



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DODIK RIDHO NURROCHMAT
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 83888

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/145 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/160 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 780.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 307.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 232.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.863.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.622.190.131
F. HARTA LAINNYA	Rp.	295.000.000
Sub Total	Rp.	10.585.190.131
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.585.190.131

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.